



PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG



RENJA BAPPEDA 2024



ONE PLAN FOR ALL
SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



AZIZ SUGIHARTO, S.AP

Penata

NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Renja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disertai dengan penetapan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Bappeda ini masih banyak dijumpai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Bappeda ini, terutama apabila dilakukan *review* atas Renja Bappeda Kabupaten Temanggung ini di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2022 dan Capaian Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA	29
2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD).....	29
2.2.2. Data Pokok	37
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.....	64
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	69
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	81
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	81
2.7 Penghargaan.....	82
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	85
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	85
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	89
4.1 Program dan Kegiatan.....	89
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda s.d Tahun 2022	11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda s.d Triwulan I Tahun 2023.....	19
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bappeda Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung.....	27
Tabel 2.4. Angka Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2028 s.d 2023 Triwulan I.....	38
Tabel 2.5. Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	40
Tabel 2.6. Hasil indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	40
Tabel 2.7. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	42
Tabel 2.8. Capaian Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 2.9. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah	42
Tabel 2.10. Nilai Indeks Penerapan MRI Kabupaten Temanggung Tahun 2022	46
Tabel 2.11. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	47
Tabel 2.12. Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I	48
Tabel 2.13. Daftar Perangkat Daerah dengan ketepatan Pengumpulan Perubahan Renja 2022 dan Renja Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung Triwulan IV	48
Tabel 2.14. Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I	50

Tabel 2.15. Jenis Dokumen Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I	50
Tabel 2.16. Rekap Keterlambatan Pengumpulan Laporan Evaluasi Tahun 2022 Triwulan IV	51
Tabel 2.17. Daftar Perangkat Daerah dengan ketepatan Pengumpulan Laporan Evaluasi Tahun 2022 Triwulan IV	53
Tabel 2.18. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	53
Tabel 2.19. Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I	54
Tabel 2.20. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2023 Triwulan I	55
Tabel 2.21. Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I	55
Tabel 2.22. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	56
Tabel 2.23. Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I	57
Tabel 2.24. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	59
Tabel 2.25. Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I	60

Tabel 2.26.Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I	61
Tabel 2.27.Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	63
Tabel 2.28.Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I	65
Tabel 2.29. <i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	70
Tabel 2.30.Usulan program dan kegiatan masyarakat	81
Tabel 2.31.Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022	81
Tabel 2.32.Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022	82
Tabel 3.1. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, terget kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	86
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024	90
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

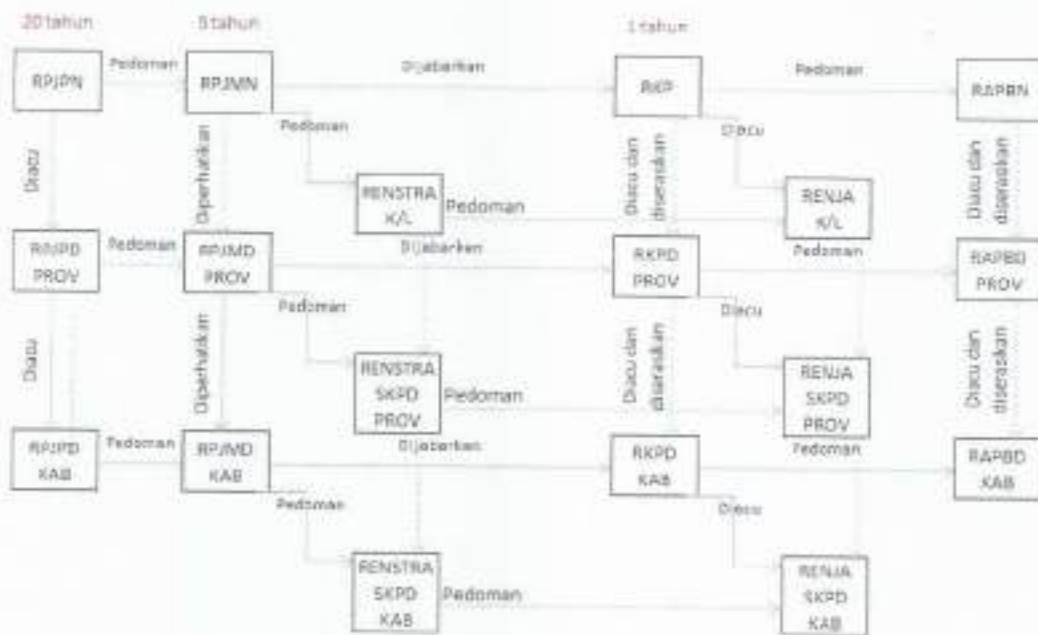
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Bappeda Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Bappeda Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Bappeda, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Bappeda, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda;
- 2) Kondisi pelayanan Bappeda;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda;
- 4) Data Pokok Pembangunan Bappeda;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Bappeda;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan

7) Informasi lain terkait pelayanan Bappeda.

b. Analisis gambaran pelayanan Bappeda;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Bappeda adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Bappeda untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Bappeda.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu berdasarkan renstra Bappeda;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Bappeda. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Bappeda dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra

Bappeda tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Bappeda;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Bappeda;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Bappeda sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Bappeda.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Bappeda.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;**
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.
Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Bappeda. Namun dalam proses ini Bappeda mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Bappeda;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Bappeda merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Bappeda;

Penyempurnaan rancangan Renja Bappeda perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Bappeda dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Bappeda dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Bappeda yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Bappeda Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Bappeda Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Bappeda Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja (Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Bappeda sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Bappeda 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda
s.d Tahun 2022

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIMESTER												CAPAIAN 2022			Kst
				K	Rp(Rupee)	Rp(DPA)	I			II			III			IV			K	Rp	Kp	
							K	Rp	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	Rp				
B	3	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
501	URUR PERUBAHAN PEMERINTAHAN			30.864.708.293	7.440.331.471	-	1.447.033.992	1.787.810.260	-	1.896.604.066	14	2.282.339.203	-	7.172.369.624	-	-	-					
501	PERENCANAAN			9.894.708.293	7.122.246.871	-	1.468.897.009	1.708.206.961	-	1.778.481.264	12	2.205.538.904	-	6.899.368.438	-	-	-					
50101	PROGRAM PERUBAHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.705.708.293	5.029.107.171	-	1.319.338.172	1.488.286.976	-	1.616.330.022	6	1.726.946.414	-	6.708.312.603	-	-	-					
		Terselenggarainya adaptasiGрад keuangan, sistem dan jasa pelayanan prangKot daerah	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
50101201	Perencanaan, Pengembangan, dan Reformasi Kinerja Perangkat Daerah			585.000.000	150.000.000		150.000.000	20.755.250		65.371.250		150.000.000		144.051.700				96,03				
501012017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		hpk	3	3	0	0,3	20.755.250	0,5	65.371.250	0,2	150.000.000	1	144.051.700	100			96,03				
50101202	Adaptasi Kelembagaan Perangkat Daerah			4.896.101.853	6.358.567.311		907.398.863	1.223.189.325		1.263.784.566		1.029.371.843		4.423.544.496				97,08				
501012023	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN		ASN	36	36	3	907.398.863	1.223.189.325	10	1.263.784.566	7	1.029.371.843	36	4.423.544.496	100			97,08				
50101206	Adaptasi Sistem Perangkat Daerah			275.000.000	104.135.500		4.049.100	31.870.662		30.862.000		37.462.110		103.924.772				99,81				
501012061	Penyusunan Komponen Sistem Lelaku Pemerintahan Perangkat Daerah		Bulan	12	12	3	93.000	3.710.000	3	1.112.500	3	1.062.500	12	5.938.400	100			99,97				
501012064	Penyusunan Sistem Lelaku Kantor		Bulan	12	12	3	250.000	3.202.800	3	5.875.300	3	15.311.000	12	36.326.350	100			99,99				
501012065	Penyusunan Sistem dan Pengembangan Perangkat		Bulan	12	12	3	-	4.068.200	3	4.657.700	3	6.253.000	12	14.999.700	100			100,00				
501012068	Penyusunan Sistem dan Pengembangan Perangkat		Bulan	12	12	3	-	5.218.300	3	1.399.700	3	4.066.300	12	8.754.350	100			99,21				

KODIS	BEDAH/PROGRAM/KE CIAYAN	INDIKATOR HIERARKI PROGRAM/SEGI ATAM	SATU SATAH	TARGET 2022				REALISASI PER TRIMULAN												REALISASI 2022			CAPAIAN 2022		
				I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				H	Rp(ribu-r)	Rp(ribu-r)	Rp(ribu-r)	K	Rp	K	Rp	K									Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
5010120609	Pengembangan Rantai Koordinasi dan Komunikasi Komunitas SKPD Daerah	Rapat koordinasi dan komunikasi Pengantar Daerah	Bulan	12	135.000.000	47.351.000	3	3.366.100	3	14.852.361	3	17.797.500	3	11.764.500	12	47.432.462	109	69.71							
80101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urusan Perantara Daerah			-	5.500.000									5.500.000		5.500.000		100,00							
5010120756	Pengadaan Perlatan dan Mesin	Terselesainya Perolehan dan Pelaksanaan Kantor		1	-	3.500.000							1	5.500.000	1	5.500.000	100	100,00							
80101208	Penyediaan Jasa Penjualan Urusan Perantara Daerah			12	898.700.000	585.787.500		3.118.767.860		3.94.728.866		124.405.863		138.242.918		631.140.306		87,26							
5010120901	Penyediaan Jasa Suci Masjid	Jasa untuk penyuci	Bulan	3	3.000.000	-		-	3	-	3	-	3	-	12	-	100	100,00							
5010120902	Penyediaan Jasa Suci Masjid	Jasa untuk penyuci	Bulan	3	150.000.000	131.100.000		21.684.853	3	22.129.313	3	22.854.001	3	23.093.025	12	90.467.992	100	69,01							
5010120903	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Fasilitas Kantor	Jasa perbaikan dan perlengkapan kantor	Bulan	3	201.700.000	28.744.750		7.980.000	3	3.519.000	3	473.000	3	16.537.000	12	38.511.000	100	99,10							
5010120904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Bulan	3	245.000.000	625.912.800		89.103.610	3	108.975.243	3	10.1076.062	3	60.006.998	12	392.161.214	100	92,08							
80101209	Pembayaran Biaya Sewa dan Perbaikan				110.898.400	537.166.460		39.019.340		78.047.282		31.416.344		371.463.843		510.951.509		96,80							
5010120902	Penyediaan Jasa Sewa dan Perbaikan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pemeliharaan	Bulan	3	110.898.400	117.980.200		19.000.070	3	39.023.641	3	15.708.172	3	42.618.366	12	116.829.849	100	99,05							
5010120903	Penyediaan Jasa Sewa dan Perbaikan	Perbaikan dan pemeliharaan	Bulan	3	110.898.400	419.166.060		19.500.270	3	39.023.641	3	13.708.172	3	328.888.177	12	401.091.660	100	96,16							

State-ata Capaian Kinerja

KODE	NOMOR/PROGRAM/HE- GATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SEK- SI/AS	SATU AN	TARGET 2022				REALISASI PER TRIMULAN												CAPAIAN 2022		KOT
				I		II		III		IV		REalisasi 2022		CAPAIAN 2022								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
50102	PROGRAM PENGHAKIMAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.290.000.000	593.560.000	-	74.353.883	-	111.972.598	-	108.050.870	-	242.835.400	-	577.143.438	100	96,76					
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100			25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pondasi			870.000.000	477.143.000		88.115.539		85.833.492		77.268.307		247.049.017		463.253.413	100	97,82					
5010220102	Kecelakaan Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kelembagaan	Jumlah dokumen perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten kepada dan	Dokumen	3	120.000.000	45.716.000	5.463.950	1	4.494.100	0,6	3.556.000	0,4	25.444.100	3	42.505.750	100	93,77					
5010220107	Kuantitatif Perencanaan dan Partisipatif Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan dokumen SKPD 2022, perubahan RPD 2023, dan revisi/revisi awal RPD 2023	Dokumen	4	750.000.000	431.433.000	46.651.449	1	81.419.392	1,2	73.711.007	0,3	220.041.917	1	822.421.660	100	97,91					
50102202	Analisis Data dan Indikator Peningkatan Daerah Pembangunan Daerah			220.000.000	65.716.000		11.829.320		16.425.821		18.842.721		18.189.121		62.066.683	100	94,48					
5010220203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Subupaten/Kota	Jumlah dokumen data pokok dan DPO	Tahun lain	4	220.000.000	65.716.000	11.829.320	1	16.425.821	1	18.842.721	1	15.189.121	4	62.066.683	100	94,48					
		Jumlah dokumen revisi/revisi Provinsi	Semua satu	2			1	0,3		0,3		0,4	2		100							

KODE	SIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHAP 2023		REALISASI PER TRIMULAN												CAPAIAN 2023	
				K	Rp (Rp/%)	I			II			III			IV			K	Rp
						K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99100003	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			195.000.000	80.715.000	7.608.894	9.723.582	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	48.763.340	18	19	20
501020303	Monev dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RPJPD, dan Rencana Strategis Daerah	Jumlah laporan evaluasi RPJPD dan RPJPD, dan rencana 2, capaian kinerja tahun 2023	Dokumen	3	100.000.000	50.715.000	1	6.723.582	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	12.179.882	19.783.340	100	100	100
		Jumlah kegiatan kinerja Peringkat Daerah	Organi	25			1												
				1.895.000.000		989.309.700	115.107.984	108.047.391	134.769.872	134.769.872	134.769.872	134.769.872	134.769.872	134.769.872	134.769.872	574.012.317	100	100	100
00103	PROGRAM KORDIRIBI DAN KORDIRIBAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
		Tingkat keberhasilan rencana kerja daerah terhadap rencana pranggot daerah sub bidang pemerintahan dan Keselamatan rakyat	%	90			34	35	80	80	80	80	80	80	80	90	100	100	100
		Tingkat keberhasilan rencana kerja pranggot daerah terhadap rencana pranggot daerah sub bidang pemerintahan dan Keselamatan rakyat	%	90			35	35	80	80	80	80	80	80	80	90	100	100	100
		Tingkat keberhasilan rencana kerja pranggot daerah terhadap rencana	%	90			35	35	80	80	80	80	80	80	80	90	100	100	100
Batas-rata Capaian Kinerja																			
Preklinik																			
Siaga Torong																			

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEMERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI PER TRIMULAN								CAPAIAN 2023		Btc			
				K	Rp/Unit	K	Rp	II		III		IV		K	Rp				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	
1	3	perangai daerah sub Masing Kecamatan dan Sember Daya Alam (SDA)	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Tingkat keberhasilan kegiatan rencana kerja perangai daerah terhadap rencana perangai daerah sub Masing Infrastruktur dan Kesejahteraan	%	90			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50100201	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				970.000.000	262.411.700	78.944.527			44.208.340		82.642.261		6	79.508.064		205.443.199		97,34
5010020101	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan layanan	Unit dan	10	205.000.000	75.716.000	11.900.199			9.252.282		10.642.331		2	12.346.382		74.344.264		98,19
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan dan layanan	Dok. dan	1			0,1			0,2				0,2					100
5010020103	Pembinaan Monev dan Evaluasi	Jumlah monev dan evaluasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan layanan	Unit dan	15	115.000.000	28.000.000	17.073.000			3.470.000		2.814.500		3	12.340.000		36.215.000		85,30
5010020105	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (SPJPT, SPJMD, dan RNPJ)	Jumlah koordinasi sub bidang pemerintahan dan layanan	Kep. dan	10	290.000.000	101.431.700	16.615.268			19.790.013		24.000.232		1	30.608.422		106.104.435		98,69
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan dan layanan	Dok. dan	3			0,5			1				0,5					100

KODE	BIDANG/PROGRAM/REGLATAM	INDUKATOR KINERJA PROGRAM/KEJADIAN ATAS	SATUAN	TASARIF 2022		REALISASI PER TRIWULAN												CAPAIAN 2022		
				K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	%
						K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5010320107	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Masyarakat	Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pengalangan masyarakat	orang	4	270.000.000	47.264.000	1	3.322.000	1	11.270.750	1,5	15.115.200,00	0,5	14.765.400	4	44.770.000	100	99,74		
501032002	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan SDA (Pembangunan dan SDA)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang elektronik dan sumber daya alam			470.000.000	170.716.000		18.625.044		36.897.583		63.831.332		65.094.143		170.798.100		98,91		
5010320301	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RRI/PT, RUMAH dan RKPJ)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang elektronik dan sumber daya alam	orang	5	175.000.000	100.716.000	1	13.293.044	1,5	27.614.382	2	33.200.032	0,5	20.105.382	5	99.213.540	100	88,31		
5010320303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah monitoring perencanaan bidang elektronik dan sumber daya alam	orang	5	115.000.000	35.000.000	1		1,5	4.078.500	1	10.977.500	0,5	4.072.030	5	24.738.500	100	98,91		
5010320305	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang elektronik dan sumber daya alam	orang	3	180.000.000	80.000.000	0,5	7.200.000	1	4.364.300	0,4	3.383.200	0,1	36.810.060	3	45.856.060	100	99,71		
501032003	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang infrastruktur			464.000.000	161.402.000		17.288.413		27.091.464		49.606.277	1	30.534.864		144.771.018		95,60		
5010320301	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RRI/PT, RUMAH dan RKPJ)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang infrastruktur	orang	3	385.000.000	75.716.000	1	10.184.719	1	15.605.382	0,6	25.595.595	0,4	21.414.082	3	72.799.778	100	96,15		
		Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang infrastruktur	orang	3			0,3		0,3		0,3	0,1	0,1	1			100			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan di Renstra Bappeda Tahun 2018-2023.

Adapun gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Pengadaan Peralatan dan Mesin;
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - o. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - p. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - q. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - r. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah;
 - s. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - t. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - u. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - v. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

- w. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- x. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- y. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- z. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- aa. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
- bb. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
- cc. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
- dd. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- ee. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **100**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
3. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
4. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN I			REALISASI 2023			CAPAIAN 2023		KRT
				K	Rp(Rangai)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	UNSUR PENTUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.331.841.326	7.031.136.699	-	1.463.287.796	-	1.463.287.796	-	1.463.287.796				
501	PERENCANAAN			8.949.389.326	6.894.649.097	-	1.440.952.605	-	1.440.952.605	-	1.440.952.605				
50101	PROGRAM PEMUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.499.304.326	5.537.890.555	-	1.196.547.777	-	1.196.547.777	-	1.196.547.777				
		Terselenggaranya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang pemerintah daerah	%	100			25		25		25				
50101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.965.704.326	4.696.682.305		1.029.599.424		1.029.599.424		1.029.599.424				
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	49	4.965.704.326	4.696.682.305	11	1.029.599.424	11	1.029.599.424	25,58	21,92			
50101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			183.600.000	110.365.300		14.676.950		14.676.950						
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	5.500.000	0,25	65.000	0,25	65.000	25,00	1,18			
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	17.000.000	0,35	5.189.000	0,35	5.189.000	30,00	30,52			
5010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.000.000	13.999.800	0,25	2.024.450	0,25	2.024.450	25,00	14,46			
5010120608	Pastikan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	24	49.000.000	20.650.000	6	2.280.500	6	2.280.500	25,00	9,64			

KODE	NIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN I			REALISASI 2023			CAPAIAN 2023			REK
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5010120609	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan/Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	38.000.000	50.215.500	6	5.118.000	6	5.118.000	24,00	10,10				
501012060	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah				947.000.000	848.242.150		114.052.848		114.052.848						
5010120602	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	99.000.000	98.960.000	9	22.478.361	9	22.478.361	25,00	22,71				
5010120603	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	317.000.000	18.283.000	3	1.690.000	3	1.690.000	25,00	9,24				
5010120604	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	Laporan	13	451.000.000	430.990.150	3	69.884.487	3	69.884.487	25,00	20,85				
501012060	Pemeliharaan Bersng Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemertintahan Daerah				563.000.000	182.600.800		38.218.555		38.218.555						
5010120602	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatan Pajak dan Perawatannya	Unit	35	113.000.000	124.100.000	12	31.057.362	12	31.057.362	34,29	25,03				
5010120609	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	450.000.000	58.500.800	0,7	7.161.193	0,7	7.161.193	23,33	12,24				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																
										Frekuensi			Sangat Tinggi			
50102	PROGRAM PENGAKAR, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.829.743.000	1.071.863.342	-	190.686.368	-	190.686.368						

KODE	HIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN I			REALISASI 2023			CAPAIAN 2023			REK
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100		25		25		25,00						
		Persentase terlaksananya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	95		25		25		26,32						
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.061.025.500	416.453.600	168.351.291		168.351.291							
5010220107	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditentaskan (RPJPD/RUMD/RKPD)	Dokumen	6	1.061.025.500	416.453.600	2,7	108.351.291	2,7	108.351.291	45,00	40,42				
50102202	Analisis Data dan Informasi Pasarisahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				88.500.000	81.465.601	13.483.230		13.483.230							
5010220203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Ditertbitkan	Buku	6	88.500.000	81.465.601	1,5	13.483.230	1,5	13.483.230	25,00	16,55				
50102203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				690.217.900	676.944.141	8.851.847		8.851.847							
5010220303	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RUMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	690.217.900	676.944.141	0,5	8.851.847	0,5	8.851.847	25,00	1,84				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1													31,67	19,90		
Predikat													Sangat Tinggi			
50103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				620.442.000	282.895.200	53.728.460		53.728.460							

KODE	BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023				REALISASI PER TRIWULAN			REALISASI 2023			CAPAIAN 2023			KBT	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
5010320105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	107.400.000	55.736.800	1,5	14.241.097	1,5	14.241.097	30,00	13	25,56					
5010320107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Fleksi Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	0	50.000.000	10.000.000	1,5	1.952.600	1,5	1.952.600	25,00	13	19,53					
50103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)				150.000.000	95.776.800		12.194.347		12.194.347								
5010320201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	75.000.000	55.725.800	1	10.963.847	1	10.963.847	25,00	13	19,67					
5010320203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah	4	25.000.000	10.000.000	1	-	1	-	25,00	13	0,00					
5010320205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	50.000.000	30.000.000	0,25	1.232.000	0,25	1.232.000	25,00	13	4,11					
50103203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				152.000.000	60.714.800		14.763.769		14.763.769								
5010320301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RISP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RISP)	Dokumen	1	76.000.000	24.988.000	0,4	8.802.922	0,4	8.802.922	40,00	13	35,03					

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEMERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023				REALISASI PER TRIWULAN I				REALISASI 2023				CAPAIAN 2023		KBT	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	3	75.000.000	35.725.800	0,7	5.060.87	0,7	5.950.847	23,33	16,68							
501030303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Perencanaan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah																
Bata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1																			
505	 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				352.452.000	136.477.602		22.325.191		22.325.191							26,85	17,03	
50502	Program penelitian dan pengembangan Daerah					136.477.602		22.325.191		22.325.191								Sangat Tinggi	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengujian	%	100			25										25		
		Persentase inovatif daerah yang dikembangkan	%	65			15										23		
50502201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan				294.488.200	96.477.600		15.199.691		15.199.691									
5050220102	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	3	168.838.200	30.000.000	0,7	2.054.000		3.654.000	23,33	8,85							
5050220112	Penelitian dan Pengembangan Data/Kebijakan dan Peraturan	Jumlah Data, Kebijakan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	4	125.630.000	66.477.000	1	12.545.691		12.545.691	25,00	18,87							
50502202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				27.964.000	20.000.001		6.224.500		6.224.500									
5050220210	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	2	27.964.000	20.000.001	0,7	6.224.500		6.224.500	35,00	31,12							

KODE	BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN I			REALISASI 2023			CAPAIAN 2023			KET
				K	Rp(Rempe)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
50502204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			59.999.800	20.000.001	901.000	901.000									
5050220401	Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	59.999.800	20.000.001	0,7	901.000	0,7	901.000	23,33	4,50				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program D1													26,67	15,84		
Jumlah													Predikat Sangat Tinggi			
				9.331.841.326	7.031.126.699	-	-	1.463.287.796	-	1.463.287.796						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													27,94	17,14		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													Predikat Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													100			
Predikat													Sangat Tinggi			

Dari Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program dan kegiatan Bappeda s.d triwulan I Tahun 2023 dapat mencapai target. Hal tersebut dibuktikan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan Bappeda telah mencapai target triwulan yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bappeda Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI			Capaian s/d 2023 (%)	Status		
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022			2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A. INDIKATOR TUJUAN														
1	Ketimpangan Pendapatan	%	18,39	17,54	18,30	18,50	18,70	18,70	17,54	18,78	18,46	18,46*	98,72	UK
B. INDIKATOR SASARAN														
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	4	4,1	4,2	n.a	n.a	4,5	4,5	4,5*	100	TT
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	n.a	n.a	88,00	89,00	90,00	83,43	84,57	84,57	96,43	98,66	100	TT
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a	n.a	Level 1	Level 1	Level 2	n.a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	100	TT
4	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	n.a	n.a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif*	100	TT
B. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN														
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT

2	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	75	80	85	90	95	100	84,18	87,22	100	100	100	TT
3	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	90	90	90	90	96,12	96,55	100	91,94	72,46	80,52	UK
4	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	90	90	90	90	90	95,10	97,27	100	95,75	71,19	79,10	UK
5	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	90	90	100	94,92	100	90,54	72,14	80,16	UK
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	%	90	90	90	90	90	93,49	96,82	100	98,80	79,80	88,66	UK
D. FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
1	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT

Pengsajian	%	45	50	55	60	65	66,7	100	100	100	100	100	TT
2	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan												

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pembangunan daerah s.d triwulan I telah sepenuhnya tercapai, terdapat 4 indikator dengan status capaian telah tercapai dan terdapat 5 indikator dengan status upaya keras. Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Kinerja Tujuan dengan status Upaya Keras yaitu Ketimpangan Pendapatan
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya data dari BPS.
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Publikasi data pada tahun $n+1$ dan yang berwenang menghitung dan menetapkan adalah BPS.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menggunakan data sementara tahun sebelumnya.
2. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - Perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD
 - Adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung
 - Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga
 - Adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
 - Adanya perbedaan kebijakan RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD
 - RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memunculkan kebijakan baru
 - Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- Merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi
 - Mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya dan Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.
- b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikator nya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kegiatan di awal tahun sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
- c. Manajemen Risiko Indeks
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
 - Pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi;
 - Belum dilaksanannya identifikasi risiko dan analisis risiko, baik tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional, mengkomunikasikan dan melaksanakan rencana tindak pengendaliannya, serta melakukan pemantauan.
 - Implementasi MRI di beberapa PD masih berproses dan proses penilaian merupakan kewenangan inspektorat dan BPKP pada triwulan IV 2023.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
 - Mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat unit

kerja;

- Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit Pemilik Risiko;
- Mendorong PD untuk meningkatkan kinerja terkait komponen dari penilaian MRI, menggunakan data sementara triwulan IV 2023.

d. Indeks inovasi Daerah

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

- Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi star-up;
- Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun;
- Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi.
- Dukungan dari semua elemen (masyarakat, PD, Perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikn data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah)

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

- Keterbatasan memberikan informasi dan Publikasi ke bawah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan desa;
- Keterbatasan SDM pengampu kegiatan;
- Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal;
- Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten;
- Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal.
- Implementasi MRI dibeberapa PD masih berproses dan proses penilaian merupakan kewenangan Inpsektorat dan ditetapkan di triwulan IV 2023.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan;
- Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang

ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran;

- Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten;
 - Proses input terus dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, nilai diambil dari screenshot hasil penilaian aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri).
3. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dengan status upaya keras NIHIL.

Sedangkan penjelasan untuk masing-masing indikator program Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 yaitu :
 - a. Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu
Faktor Pendorong indikator tersebut adalah
 - adanya komitmen Perangkat Daerah, fasilitasi dan pendampingan secara insentif dari verifikator Bappeda selaku Perangkat Daerah pengampu fungsi penunjang perencanaan;
 - Penggunaan Google Spreadsheet sehingga PD bisa mengisi tepat waktu.
 - b. Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah
Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Keaktifan PD dalam koordinasi dengan verifikator sehingga pengiriman tepat waktu.
 - c. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian
Faktor Pendorong indikator tersebut adalah Dukungan pemerintah dari lingkup Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi star-up serta antusiasme masyarakat dalam menciptakan inovasi dan ada sosialisasi krenova kepada masyarakat.
 - d. Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah kerjasama yang bagus antara responden, surveyor dan pihak ketiga.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih dalam proses penyusunan laporan akhir yang akan tercapai pada triwulan IV 2023.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dan komunikasi.

2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 4 yaitu :
 - a. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah komitmen daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sampai dengan penganggaran;
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - 3) Faktor Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan koordinasi terhadap perangkat daerah
 - b. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah komitmen daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sampai dengan penganggaran;
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - 3) Faktor Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - c. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah komitmen daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sampai dengan penganggaran;
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - 3) Faktor Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan koordinasi terhadap perangkat daerah.
 - d. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia
 - 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah komitmen daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sampai dengan penganggaran;
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.

- 3) Faktor Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan koordinasi terhadap perangkat daerah.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada BAPPEDA terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Data Pokok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Pokok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

a. Indikator Tujuan

1) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan masalah sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah agar tidak terjadi ketimpangan, diantaranya dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi;
- b. memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang; dan
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tabel 2.4.

Angka Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Ketimpangan Pendapatan	n.a.	n.a.	17,54	18,78	18,46	18,46*

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara Tahun 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Temanggung tahun 2023, sehingga angka tahun 2023 masih menggunakan angka tahun 2022 yaitu sebesar 18,46. Angka tersebut turun sebesar 0,32 jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 18,78. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk menurun atau pendapatan penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Indikator Sasaran 1 (Perencanaan)

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan

penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu :

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Inti komponen dari keempat aspek tersebut adalah adanya perencanaan yang terintegrasi, sinergitas dan sinkronisasi.

Tabel 2.5.
Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023
Triwulan I

No.	Urutan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Aspek Integrasi	n.a	n.a	>4	89,23	5	5*
2.	Aspek Sinkronisasi	n.a	n.a	>4	89,15	5	5*
3.	Aspek Sinergitas	n.a	n.a	>4	100	5	5*

Keterangan * : data sementara tahun 2022

Variabel kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup sub variabel integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sudah mencapai angka maksimal. Adapun variabel proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup sub variabel transparan, Responsif, Terukur, Efisien, Efektif, Berkeadilan dan Berkelanjutan memiliki nilai 3,6.

Tabel 2.6.
Hasil indeks Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Variabel	Nilai	Bobot	Nilai Sub Variabel	Total Nilai Sub Variabel
1.	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5,00	0,50	2,50	4,5
2.	Proses dan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4,00	0,50	2,00	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022 TW IV

(Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2023 kondisi Triwulan I belum dapat dihitung dikarenakan beberapa aspek realiasinya baru dapat dihitung pada akhir tahun).

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan Nilai indek Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

2) Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Angka Kemiskinan.

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah jumlah capaian indikator tujuan dalam RPJMD dibagi jumlah indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD dikali 100.

Tabel 2.7.
Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Persentase Rata-rata capaian indikator Tujuan	n.a	82,79	78,49	89,42	99,76	99,76*
2.	Persentase Rata-rata capaian indikator Sasaran	n.a	84,07	90,64	96,83	97,56	97,56*
3.	Persentase (%)	n.a	98,48	86,60	92,35	98,66	98,66*

Keterangan * : data sementara tahun 2022

Tabel 2.8.
Capaian Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Indikator	Realisasi	Capaian s.d 2022
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	70,77	100,0
2	Angka Kemiskinan	9,33	100,0
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	100,0
4	Pendapatan per Kapita	30,93	100,0
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,54	100,0
6	Ketimpangan Pendapatan	18,46	98,72
7	Indeks reformasi Birokrasi	64,61	99,40
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,41	100
RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN			99,76

Tabel 2.9.
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2022 Berdasarkan
Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi 2022	Capaian S.D 2023
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,8	7,41	95,00
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49	12,55	100,00
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	3,98	100,00
4	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,41	2,97	87,10
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,53	75,70	100
6	Indeks Kinerja RSUD		80	93	100
7	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	84	83,79	99,75
8	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,5	88,56	98,95
9	Indesk rasa aman	angka	4,44	4,55	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	100,0
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75	74,01	98,68
12	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27	27,47	100
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	95,65	95,71	100,00
14	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,0043	93,45
15	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,8	0,54	100,00
16	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,3	80,10	100,00
17	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/t h	21,34	24,34	100,00
18	Tingkat ketersediaan energi perkapita (standart nasional 2400)	kcal/kap /hr	2935	3.198,00	100,00
19	Tingkat ketersediaan protein perkapita (standart nasional 63)	gram/kap ita/hr	103,8	83,19	80,14
20	Tingkat Ketersedisian lemak perkapita (Standart nasional 37, minimal 25% dari	gram/kap ita/hr	37,5	64,66	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi 2022	Capaian S.D 2022
	tingkat konsumsi protein)				
21	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,97	98,99	100
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		70,53	69,86	99,05
23	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	angka	80	83,84	100,00
24	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,72	100,00
25	Persentase desa yang ber predikat mandiri	%	6,39	9,77	100,00
26	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,61	1,32	100
27	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	3	3,12	100,00
28	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	96	88,33	92,01
29	Persentase Koperasi Sehat	%	10,71	15,09	100,00
30	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,015	0,0148	98,67
31	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20	20,14	100,00
32	Indeks Kemudahan Berusaha	angka	65	78,00	100
33	Persentase peminjam di perpustakaan	%	82	86,13	100,00
34	Indeks manajemen kearsipan	angka	67	62,46	93,23
35	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	angka	3,51	3,67	100,00
36	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	1,53	92,73
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	4,2	4,5	100,00
38	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	90	98,66	100,00
39	Manajemen Risiko Indeks	level	Level 2	Level 3	100,00
40	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat	Sangat	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi 2022	Capaian S.D 2022
			Inovatif	Inovatif	
41	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,69	100,00
42	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,5	62,74	78,92
43	Indeks Profesionalitas ASN	angka	50,09	53,13	100
44	Indeks Sistem Merit	angka	0,61	0,482	79,02
45	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,5	88,89	97,15
46	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	25	100	100,00
47	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3,5	3,35	95,71
48	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	BB	B (64,73)	91,07
49	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,95	4,3	100
50	Indeks Gotong-Royong	Angka	4,22	4,33	100
51	Indeks Toleransi	Angka	4,19	4,5	100
52	Indeks Resiko Bencana	Angka	192,08	174,59	100,00
53	Indeks Keputusan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Angka	84	84,30	100,00
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					97,56

(Realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan/ IKU tahun 2022 kondisi Triwulan I belum dapat dihitung dikarenakan beberapa indikator realisasinya baru dapat dihitung pada akhir tahun).

3) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Indeks Penerapan Manajemen Risiko dapat diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau

unit kerja lain yang ditunjuk. Sedangkan dalam lingkup Kementerian/Lembaga, UPR tingkat K/L dapat diwakili oleh unit Sekretariat Kementerian/Lembaga. Terkait dengan UPR unit kerja diwakili oleh unit kerja yang memiliki rencana strategis lima tahunan. Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*.

Metodologi penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,008 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,797** serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910.

Tabel 2.10.

Nilai Indeks Penerapan MRI Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Area/Komponen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
A.	PERENCANAAN	40,00%		1,20
1	Kualitas Perencanaan	40,00%	3,00	1,20
B.	KAPABILITAS	30,00%		0,79
1	Kepemimpinan	5,00%	2,56	0,13
2	Strategi dan Kebijakan	5,00%	3,00	0,15
3	Sumber Daya Manusia	5,00%	2,75	0,14
4	Kemitraan	2,50%	2,00	0,05
5	Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,60	0,33
C.	HASIL	30,00%		0,81
6	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,50	0,47

No	Area/Komponen	Bobot Unsur	Skor	Nilai
7	Outcomes	11,25%	3,00	0,34
	MANAJEMEN RISIKO INDEKS	100,00%		2,797

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

(Penilaian MRI baru Tahun 2023 dilaksanakan pada akhir tahun).

c. Fungsi Penunjang Perencanaan

1) Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Perubahan RKPD, Renja, dan Perubahan Renja. Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dihitung dengan rumus: jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dikalikan 100. Sesuai dengan agenda perencanaan, maka dokumen perencanaan pada Triwulan I yang sudah tersusun adalah RKPD Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	96	96	144	141	94	94*
2.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah	96	96	144	141	94	94*
3.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100*

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 2.12.
Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
	Dokumen Perencanaan pembangunan daerah tepat waktu						
1.	RPJMD/Perubahan RPJMD	-	1	-	1	-	-
2.	Renstra/Perubahan Renstra	-	47	-	46	-	-
3.	RKPD	1	1	1	1	1	1*
4.	Renja PD	47	47	46	46	46	46*
5.	Perubahan RKPD	1	1	1	1	1	1*
6.	Perubahan Renja PD	47	47	46	46	47	47*
JUMLAH			96	144	94	141	94*

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara tahun 2022

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2022 mencapai 100%, hal ini dikarenakan disiplin dan kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi data.

Tabel 2.13.
Daftar Perangkat Daerah dengan ketepatan Pengumpulan
Perubahan Renja 2022 dan Renja Tahun 2023 di
Kabupaten Temanggung Triwulan IV

No.	Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2022	Renja 2023
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	✓	✓
2	Dinas Kesehatan	✓	✓
3	Rumah Sakit Umum Daerah	✓	✓
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	✓	✓
6	Dinas Sosial	✓	✓
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	✓	✓
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	✓	✓
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	✓	✓
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	✓	✓
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,	✓	✓
13	Dinas Perhubungan	✓	✓
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	✓	✓
16	Dinas Penanaman Modal	✓	✓
17	Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata	✓	✓
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓

No.	Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2022	Renja 2023
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	✓	✓
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	✓	✓
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓
22	Inspektorat	✓	✓
23	Sekretariat Daerah	✓	✓
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	✓	✓
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓	✓
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓	✓
27	Kecamatan Temanggung	✓	✓
28	Kecamatan Tembarak	✓	✓
29	Kecamatan Pringsurat	✓	✓
30	Kecamatan Kaloran	✓	✓
31	Kecamatan Parakan	✓	✓
32	Kecamatan Bulu	✓	✓
33	Kecamatan Kedu	✓	✓
34	Kecamatan Kandangan	✓	✓
35	Kecamatan Candiroto	✓	✓
36	Kecamatan Ngadirejo	✓	✓
37	Kecamatan Jumo	✓	✓
38	Kecamatan Wonobojo	✓	✓
39	Kecamatan Kranggan	✓	✓
40	Kecamatan Bejen	✓	✓
41	Kecamatan Kiedung	✓	✓
42	Kecamatan Bansari	✓	✓
43	Kecamatan Tlogomulyo	✓	✓
44	Kecamatan Selopampang	✓	✓
45	Kecamatan Gemawang	✓	✓
46	Kecamatan Tretep	✓	✓

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

2) Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat beberapa tata cara pengendalian yang diatur diantaranya pengendalian dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen evaluasi yang dimaksud meliputi Evaluasi RPJMD,

Evaluasi Renstra PD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Renja PD, dan Laporan IKPD.

Tabel 2.14.
Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	n.a	378	128	116	133	133*
2.	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	n.a	378	135	133	133	133*
	Persentase (%)	n.a	100	94,81	87,22	100	100*

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 2.15.
Jenis Dokumen Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu							
1.	Evaluasi RPJMD	1	-	1	0	0	0*
2.	Evaluasi Renstra	47	-	47	0	0	0*
3.	Evaluasi RKPD	2	2	2	2	2	2*
4.	Evaluasi Renja PD	156	156	156 (78*2)	77	77	77*
5.	Laporan IKPD dan Data Pokok	110	110	110 (55*2)	54	54	54*
JUMLAH			316	268	316	133	133*

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara tahun 2022

Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Triwulan IV Tahun 2022 yang disusun perangkat daerah sebanyak 133 laporan dan mencapai 100%. Tercapainya capaian laporan evaluasi tepat waktu dikarenakan disiplin dan kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi data.

Tabel 2.16.
Rekap Keterlambatan Pengumpulan Laporan Evaluasi Tahun 2022 Triwulan IV

No.	Uraian	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah Laporan Evaluasi
1.	EVALUASI RKPD	2	-	2
2.	EVALUASI RENJA	59	18	77
3.	LAPORAN IKPD DAN DATA POKOK	54	0	54
JUMLAH		115	18	133

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 2.17.
Daftar Perangkat Daerah dengan ketepatan Pengumpulan
Laporan Evaluasi Tahun 2022 Triwulan IV

No	Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Tepat waktu
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	✓
2	Dinas Kesehatan	✓
3	Rumah Sakit Umum Daerah	✓
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	✓
6	Dinas Sosial	✓
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	✓
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	✓
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	✓
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,	✓
13	Dinas Perhubungan	✓
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	✓
16	Dinas Penanaman Modal	✓
17	Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata	✓
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	✓
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	✓
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓
22	Inspektorat	✓
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	✓
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓
26	Bagian Umum	✓
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	✓
28	Bagian Organisasi	✓
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	✓
30	Bagian Hukum	✓
31	Bagian Pemerintahan	✓
32	Bagian Pembangunan	✓
33	Bagian Perekonomian	✓
34	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	✓
35	Kecamatan Temanggung	✓
36	Kecamatan Tembarak	✓

No	Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Tepat waktu
37	Kecamatan Pringsurat	✓
38	Kecamatan Kaloran	✓
39	Kecamatan Parakan	✓
40	Kecamatan Bulu	✓
41	Kecamatan Kedu	✓
42	Kecamatan Kandangan	✓
43	Kecamatan Candiroto	✓
44	Kecamatan Ngadirejo	✓
45	Kecamatan Jumo	✓
46	Kecamatan Wonobojo	✓
47	Kecamatan Kranggan	✓
48	Kecamatan Bejen	✓
49	Kecamatan Kledung	✓
50	Kecamatan Bansari	✓
51	Kecamatan Tlogomulyo	✓
52	Kecamatan Selopampang	✓
53	Kecamatan Gemawang	✓
54	Kecamatan Tretep	✓

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dinyatakan tepat waktu dalam pengumpulan laporan evaluasi Tahun 2022, ketepatan waktu Perangkat Daerah dalam memenuhi data dapat mempermudah Bappeda dalam melakukan evaluasi terhadap penetapan dan perumusan program.

3) Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.18.
Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan Renstra	n.a	99	84	58	57	50
2.	Jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	n.a	103	87	58	62	69
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	96,12	96,55	100	91,94	72,46

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Konsistensi kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 72,46%.

Tabel 2.19.
Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2023			
		Renstra	Renja	Kegiatan dalam Renja yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra yang Tidak Terakomodir dalam Renja
1	DINKOPDAG	7	12	4	3
2	DINBUDPAR	13	14	12	3
3	BAGIAN PEREKONOMIAN	2	2	2	-
4	DINAS PENANAMAN MODAL	10	10	9	1
5	DINPERINAKER	9	8	8	10
6	DKPPP	28	15	15	13
	TOTAL	69	61	50	30

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Data Alam terdiri dari 6 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jumlah kegiatan Renstra Tahun 2023 adalah 69, jumlah kegiatan Renja Tahun 2023 adalah 61. Dengan jumlah tersebut, jumlah kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra adalah 50 sedangkan jumlah kegiatan di Renstra yang tidak terakomordir dalam Renja adalah 30.

4) Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Infrastruktur dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada Sub Bidang Infrastruktur tahun 2023 sampai dengan Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.20.

Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Renstra	n.a	136	112	33	45	42
2.	Jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Infrastruktur	n.a	143	118	33	47	59
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	95,10	94,92	100	95,74	71,19

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Konsistensi kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 71,19%.

Tabel 2.21.

Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2023			
		Renstra	Renja	Kegiatan dalam Renja yang Sesuai Renstra	Kegiatan di Renstra yang Tidak Terakomodir dalam Renja
1	DPUPR	17	16	13	4
2	DINAS PERHUBUNGAN	20	11	11	9
3	DPRKPLH	22	19	18	4
	TOTAL	59	46	42	17

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Sub Bidang Infrastruktur terdiri dari 3 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Jumlah kegiatan Renstra Tahun 2023 adalah 59, jumlah kegiatan Renja Tahun 2023 adalah 46. Dengan jumlah tersebut, jumlah kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra adalah 42 sedangkan jumlah kegiatan di Renstra yang tidak terakomodir dalam Renja adalah 17.

5) Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 sampai dengan Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.22.

Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai Renstra	n.a	130	152	231	287	259
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	n.a	139	157	231	317	359
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	93,53	96,82	100	90,54	72,14

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 202

Konsistensi kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 triwulan I sebesar 72,14%

Tabel 2.23.

Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2023			
		Renstra	Renja	Kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra	Kegiatan di reastra yang tidak terakomodir dalam renja
1	BPBD	0	7	0	0
2	BANKESBANGP OL	9	10	9	0
3	CAPII	11	8	8	3
4	SATPOL	11	8	9	3

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2023			
		Ronstra	Renja	Kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra	Kegiatan di ronstra yang tidak terakomodir dalam renja
5	SETWAN	13	12	12	1
6	SETDA	18	18	17	1
7	BPKPAD	10	11	10	0
8	DINSOS	16	13	13	3
9	DINPERMADES	6	8	5	1
10	INSPEKTORAT	10	10	9	1
11	BKPSDM	12	12	12	0
12	BAPPEDA	15	15	14	1
13	KOMINFO		10		
14	KECAMATAN TEMANGGUNG	14	10	9	5
15	KECAMATAN TEMBARAK	13	8	8	5
16	KECAMATAN PRINGSURAT	13	8	8	5
17	KECAMATAN KALORAN	13	8	8	5
18	KECAMATAN PARAKAN	15	10	9	6
19	KECAMATAN BULU	13	8	7	6
20	KECAMATAN KEDU	11	8	7	4
21	KECAMATAN KANDANGAN	12	9	7	5
22	KECAMATAN CANDIROTO	12	8	6	6
23	KECAMATAN NGADIREJO	14	9	8	6
24	KECAMATAN JUMO	11	8	7	4
25	KECAMATAN WONOBOYO	0	8	0	0
26	KECAMATAN KRANGGAN	12	10	7	5
27	KECAMATAN BEJEN	11	10	8	3
28	KECAMATAN KLEDUNG	12	8	7	5
29	KECAMATAN BANSARI	11	8	7	4
30	KECAMATAN TLOGOMULYO	10	9	7	3
31	KECAMATAN SELOPAMPANG	9	9	6	3
32	KECAMATAN GEMAWANG	11	8	7	4
33	KECAMATAN TRETEP	11	9	8	3
JUMLAH		359	315	259	101

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 33 Perangkat Daerah, yaitu BPBD, Bankesbangpol, Dindikcapil Dinpermades, Dinkominfo, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Satpol PP & Damkar, Dindikcapil,

Bappeda, BPKPAD, BKPSDM, serta beberapa kecamatan seperti yang dapat dilihat pada tabel. Jumlah kegiatan Renstra Tahun 2023 adalah 359, jumlah kegiatan Renja Tahun 2023 adalah 315. Dengan jumlah tersebut, jumlah kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra adalah 259 sedangkan jumlah kegiatan di Renstra yang tidak terakomordir dalam Renja adalah 101.

6) Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Pembangunan Manusia dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia tahun 2023 sampai dengan Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.24.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan Renstra	n.a	115	108	59	82	79
2.	Jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Pembangunan Manusia	n.a	123	112	59	83	99
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	93,49	96,43	100	98,80	79,80

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Konsistensi kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 79,80%.

Tabel 2.25.
Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang
Pembangunan Manusia dalam Rencana Kerja dan
Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2023			
		Renstra	Renja	Kegiatan dalam Renja yang Sesuai Renstra	Kegiatan di Renstra yang Tidak Terkomodir dalam Renja
1	DINDIKPORA	17	15	14	3
2	DINPUSIP	12	12	11	1
3	DINKES	20	18	15	5
4	DINSOS	15	13	12	3
5	DPPPAPPKB	27	26	23	4
6	BAGIAN KESRA	4	1	1	3
7	RSUD	4	3	3	0
	TOTAL	99	85	79	19

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Sub Bidang Pembangunan Manusia terdiri dari 7 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPPAPPKB, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, serta RSUD Kabupaten Temanggung. Jumlah kegiatan Renstra Tahun 2023 adalah 99, jumlah kegiatan Renja Tahun 2023 adalah 85. Dengan jumlah tersebut, jumlah kegiatan dalam Renja yang sesuai Renstra adalah 79 sedangkan jumlah kegiatan di Renstra yang tidak terakomordir dalam Renja adalah 19.

d. Indikator Sasaran 2 (Penelitian Dan Pengembangan)

1) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu

inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Implementasi inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri akan dinilai, diberikan skor dan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasi daerah akan dipilih pemenang inovasi dan diberikan penghargaan serta selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan.

Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Target Nilai Indeks Inovasi Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
2	Nilai Indeks Inovasi Daerah	890	890	11.700	45,58	70,92	70,92
3	Peringkat	46	112	4	28	6	6
4	Kategori	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : Bidang Litbang Bappeda Kab. Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara Tahun 2022

(Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 Triwulan I dapat dihitung pada akhir tahun).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten dengan predikat "sangat inovatif". Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 70,92 dengan predikat Sangat Inovatif.

Penganugerahan *Innovative Government Award* merupakan penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan Inovasi

dengan cara -cara yang inovatif. Melalui penganugerahan IGA ini, diharapkan Kabupaten Temanggung dapat memberikan contoh kepada Daerah lain untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria penilaian menggunakan skor:

- Sangat Inovatif : 60,01 – 100,00
- Inovatif : 35,00 – 60,00
- Kurang Inovatif : 0,01 – 34,99
- Tidak Dapat Dinilai : 0

e. Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan

1) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka beberapa tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu melaksanakan kelitbangan

pemerintahan dalam negeri di Kabupaten melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi dan kreatifitas daerah pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang Oleh sebab itu, salah satu indikator kinerja sasaran yang dinilai oleh Bidang Litbang adalah Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.

Tabel 2.27.

Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengkajian	3	19	3	6	8	8
2	Jumlah hasil Penelitian dan Pengkajian	3	10	3	6	8	8
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara tahun 2022

(Penyusunan Laporan Analisis Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, untuk triwulan I sampai tahap pengumpulan data sekunder melalui wawancara yang melibatkan beberapa responden diantaranya BPD, LPMK/D, Perangkat Desa (sekdes), Pelaku usaha).

Berdasarkan Laporan Akhir Analisis Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, bahwa jumlah Hasil Penelitian

dan Pengkajian di Kabupaten Temanggung meliputi 8 indeks yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Pemuda
- b. Indeks Gotong Royong
- c. Indeks Toleransi
- d. Indeks Rasa Aman
- e. Indeks Pembangunan Kebudayaan
- f. Indeks Pembangunan Olahraga
- g. Indeks Kemudahan Berusaha
- h. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Delapan Indeks tersebut dimanfaatkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2) Persentase Inovasi Daerah yang Dikembangkan

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor (62 inovator) dilaksanakan melalui :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi/inovator bisnis; dan
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Tabel 2.28.
 Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023
 Triwulan I

No	Urutan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	12	4	5	10	10	10
2	Inovasi yang dilombakan di tingkat provinsi	21	6	5	10	10	10
3	Persentase	57,1 4	66,6 7	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Keterangan * : data sementara tahun 2022

(Lomba krenova yang dikembangkan pada triwulan I sudah dilakukan sosialisasi krenova yang mengundang desa, kecamatan, sekolah dan stakeholder pada tanggal 10 Februari 2023, untuk saat ini sudah sampai tahap pendaftaran).

Persentase Inovasi Daerah yang Dikembangkan pada tahun 2022 sebanyak 10 inovasi , inovasi tersebut didefinisikan sebagai inovasi yang memiliki keunggulan, spesifikasi khusus yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan, serta memiliki dampak yang luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 10 inovasi tersebut meliputi :

1. Fusion Bakery;
2. Si Holer;
3. Telur Ayam Omega-3 "Nabati";
4. Tatap Lentera (Tongkat Penuntun Adaptif Disabilitas Sensorik Mata/Netra);
5. Kampung Ulin Majapahit di Negeri Bringin;
6. Xstangco (Ekstrak Batang Tembakau Sebagai Pestisida Organik);
7. Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* Modern;
8. Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan;
9. Water Meter Digital; dan
10. Saklar Lampu dan Exhaust Fan Toilet Otomatis.

Jumlah pendaftar krenova pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah: 44

2. Masyarakat: 19

3. Pelajar: 7

Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya sosialisasi dan publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa penghargaan yang di raih Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemenang krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Yaitu :

1. Mesin Perajang Rumput dan Pembuat Ceriping pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
2. Antiseptik Daun Jambu (*Guava Leaf Antiseptic*) pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, serta mendapatkan hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
3. Mesin Sangan Kopi juara utama Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
4. Inovasi Pewarna Alam Shibiru menjadi Juara Dua lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
5. Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan menjadi pemenang utama peringkat 9 Lomba Kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Bappeda dari 13 indikator tujuan/sasaran dan program, terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Ketimpangan Pendapatan
Hal ini disebabkan karena Publikasi data pada $n+1$ dan yang berwenang menghitung dan menetapkan adalah BPS.
 - b. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Hal ini disebabkan karena terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - c. Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur
Hal ini disebabkan karena terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - d. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat karena terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
 - e. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia karena terdapat dokumen perencanaan yang tidak terakomodir dalam renstra.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, antara lain :
 - a. Masih rendahnya kualitas data pembangunan;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitor dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;

- d. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna menciptakan keselarasan perencanaan pembangunan sehingga tercipta sinergitas dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan;
- c. Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
- d. Meningkatkan validitas dan realibilitas data pembangunan;
- e. Meningkatkan sosialisasi dan desimininasi informasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29.
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Paga Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
A UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Tem anggung	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.319.442.555	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Te manggung	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.790.291.055	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12	laporan	4.490.042.555	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12	laporan	4.931.042.555	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tem anggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	orang/bn	4.490.042.555	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Te manggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	orang/bn	4.931.042.555	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum terfasilitasi	5	kegiatan	109.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum terfasilitasi	5	kegiatan	108.965.500	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tem anggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.500.000	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Te manggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.500.000	
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tem anggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	17.000.000	3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Te manggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	17.000.000	
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Kab.Tem anggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	1	paket	13.500.000	4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Kab.Te manggung	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Pengandaian yang Disediakan	1	paket	13.500.000	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

RAMBANG AWAL RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5		5	
6)	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	23.000.000	6)	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	23.000.000	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	50.000.000	7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	49.965.500	
8)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	72	laporan	548.400.000	8)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	72	laporan	548.400.000	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.500.000	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.500.000	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	99.000.000	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	98.960.000	
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	17.000.000	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	16.923.000	
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	430.900.000	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	430.900.000	
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Temanggung	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	34	unit	172.000.000	5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	34	unit	202.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KERUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatorif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	32	unit	5	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	32	unit	124.000.000	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Te manggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	32	unit	154.000.000	
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	48.000.000	2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Te manggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	48.000.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab.Temanggung	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	819.782.500	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab.Te manggung	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.069.782.500	
				95	%						95	%		
4	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab.Temanggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	8	dok	619.782.800	4	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab.Te manggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	8	dok	869.782.500	
				3	dok						3	dok		
1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepada Kabupaten dan APBD	3	dok	50.000.000	1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab.Te manggung	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepada Kabupaten	3	dok	50.000.000	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

RANCANGAN AWAL RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Setuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5		5	
	Daerah dengan dokumen Kebijakan Lainnya		Kabupaten Kepada Desa					Daerah dengan dokumen Kebijakan Lainnya		dan APBD Kabupaten Kepada Desa				
2)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP- D)	5	dok	569.782.500	2)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Te manggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP- D)	5	dok	819.782.500	
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab.Tem anggung	Jumlah data dan Informasi pemerintah daerah yang diterbitkan	3	buku	100.000.000	b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab.Te manggung	Jumlah data dan Informasi pemerintah daerah yang diterbitkan	3	buku	100.000.000	
1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Tem anggung	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	buku	100.000.000	1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Te manggung	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	buku	100.000.000	
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab.Tem anggung	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang disusun	5	laporan	100.000.000	c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab.Te manggung	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang disusun	5	laporan	100.000.000	
1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	laporan	100.000.000	1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab.Te manggung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	laporan	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatorif	No	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kot
1		3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Tem bung	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	1.585.000.000	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Te manggung	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan keajahteraan rakyat	90	%	1.715.000.000	
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	90	%					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang Kewilayahan	90	%		

RAMBANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	9	dok	5	
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab.Tem anggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang diverifikasi	9	dok	700.000.000,-	a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab.Te manggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang diverifikasi	9	dok	700.000.000,-	
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dok	300.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te manggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dok	300.000.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3	laporan	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab.Te manggung	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3	laporan	75.000.000	
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dok	250.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te manggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	dok	250.000.000	

RANCANGAN AWAL RCPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Setuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Setuan	Kebutuhan Dana	Ket
		3	4	5	6	7	1	2	3	4	6		6	
4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab.Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	PD	75.000.000	4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab.Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	PD	75.000.000	
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab.Temanggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perkeonomian dan SDA yang diverifikasi	7	dokumen	485.000.000,-	b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab.Temanggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perkeonomian dan SDA yang diverifikasi	7	dokumen	615.000.000,-	
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dok	320.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dok	450.000.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Kab.Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja	6	PD	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kab.Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	6	PD	75.000.000	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

RANCANGAN AWAL RKPD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagi Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	5	
			Bidang Perekonomian							Perekonomian				
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	dok	90.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	dok	90.000.000	
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tem anggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang diverifikasi	3	dok	152.000.000	c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Te mangg ung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang diverifikasi	3	dok	400.000.000	
4)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	dok	400.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	dok	325.000.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tem anggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	PD	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Te mangg ung	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	PD	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ret
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	8	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab.Temanggung	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengkajian daerah yang dikembangkan	100	%	970.000.000	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab.Temanggung	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengkajian daerah yang dikembangkan	100	%	1.170.000.000	
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab.Temanggung	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	7	laporan	770.000.000	a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab.Temanggung	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	7	laporan	920.000.000	
1)	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab.Temanggung	Jumlah laporan Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	laporan	400.000.000	1)	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab.Temanggung	Jumlah laporan Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	laporan	500.000.000	
2)	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	laporan	220.000.000	2)	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	laporan	220.000.000	

HABIL ANALISIS KEBUTUHAN

KAWANGM AWAL RRPD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerjanya	Satua Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerjanya	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
3)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab.Tem anggung	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	laporan	150.000.000	3)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab.Te anggung	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	laporan	200.000.000	
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab.Tem anggung	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dinasun	2	dok	50.000.000	b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab.Te anggung	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dinasun	2	dok	100.000.000	
1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	Dok	50.000.000	1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Te anggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	Dok	100.000.000	
c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab.Tem anggung	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi yang dinasun	2	dok	100.000.000	c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab.Te anggung	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi yang dinasun	2	dok	100.000.000	
1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dok	100.000.000	1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab.Te anggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dok	50.000.000	

KARANGAWAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikator	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2)	3	4	5	6	7	1	2)	3	4	1	laporan	5	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbang	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbanga	1	laporan	50.000.000		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbang	Kab.Te manggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbang	1	laporan	50.000.000	
TOTAL						8.694.225.055		TOTAL					9.745.073.555	
BELANJA GAJI						4.490.042.555		BELANJA GAJI					4.931.042.055	
BELANJA NON GAJI						4.204.182.500		BELANJA NON GAJI					4.814.031.500	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Bappeda. Namun dalam proses ini Bappeda mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.30.
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
NIHIL					

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, inovasi yang telah dilaksanakan di Bappeda ada 4 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Ikat Rajut (Inovasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan)	Bappeda, PD terkait, Lembaga Non Pemerintahan	Non APBD	Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sinergi Pemerintahan Kabupaten dengan Lembaga Non Pemerintahan	Kegiatan penanggulangan kemiskinan terkait pendidikan dan sosial	Penurunan angka kemiskinan Tahun 2018 : 9,87, Tahun 2019 : 9,42, Tahun 2020 : 9,96, Tahun 2021 : 10,17, Tahun 2022 : 9,33	Bappeda 2020
2	Mustika Desa (Masyarakat unggulan sejahtera dengan pekarangan, desa bebas sampah dan konservasi lahan)	Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan masyarakat desa/keurahan	APBD dan Non APBD	Model perencanaan pembangunan kolaboratif guna peningkatan ekonomi masyarakat melalui tani pekarangan, desa bebas sampah konservasi lahan	Menumbuhkan kecakapan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi lingkungan, merumbuhkan pemahaman peduli lingkungan	Pertumbuhan pendapatan keluarga, pertumbuhan ekonomi yang pro lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok miskin yaitu pangan,	Bappeda 2020

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
					berkelanjutan dalam proses produksi dan konsumsi (green economy), Menumbuhkan budaya masnidri dalam meningkatkan ekonomi.	papan, pendidikan dan kesehatan	
3	Perda Inovasi Daerah	Bappeda, PD terkait, Lembaga non Pemerintahan, Masyarakat	APBD	Usulan dari Bappeda dalam mendukung inovasi Daerah	Dokumen Perda Inovasi Daerah	Terpenuhinya dokumen pendukung penyelenggaraan inovasi daerah	Pemkab Temanggung
4	Pemanfaatan E-Katalog sebagai media publikasi informasi kegiatan dan hasil kajian litbang di Bappeda Kabupaten Temanggung	Pemerintah Kabupaten Temanggung, Bappeda, Masyarakat	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pembuatan katalog litbang • Membuat database dan inventarisasi data dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan bidang litbang • Membuat katalog litbang • Mengimplementasikan penggunaan e-katalog • Membuat evaluasi hasil kegiatan 	E-Katalog sebagai media publikasi informasi	Peningkatan penilaian akses data/informasi kelitbang	Bappeda Tahun 2022

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bappeda ada 16 (enam belas) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Peringkat I Kategori Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2020	Kementerian PPN/Bappenas RI	Nasional	BAPPEDA

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
2	Peringkat I (Predikat BB) Kategori Kabupaten dalam Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
3	Peringkat IV (Sangat Inovatif) Kategori Kabupaten Sangat inovatif (<i>Inovative Government Award (IGA)</i>) Tingkat Nasional Kategori Kabupaten Tahun 2020	Kemendagri RI	Nasional	BAPPEDA
4	Peringkat III dari Aspek Pasar Dalam Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
5	Juara Utama Inovasi Drone Semprot Pertanian dan Hidroponik Organik sebagai Juara Favorit dalam ajang KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
6	Juara Harapan Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Shibiru)	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
7	Penghargaan Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan predikat "Finalis"	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
8	Penghargaan dan Apresiasi kepada Bappeda Temanggung atas pelaksanaan Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBK) Tahun 2022	Bupati Temanggung	Kabupaten	BAPPEDA
9	Penghargaan kepada Bappeda atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Predikat Nilai "A" (Memuaskan)	Bupati Temanggung	Kabupaten	BAPPEDA
10	Lomba Kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
11	Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Juara 1 Kategori Ekosistem Inovasi Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
12	Penghargaan Kemenkumham Kepada Bupati Temanggung atas Jumlah Indikasi Geografis Terbanyak Dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Tahun 2022	Kemenkumham	Nasional	BAPPEDA

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
13	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Terinovatif tingkat Nasional Tahun 2022	Kemendagri RI	Nasional	BAPPEDA
14	Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai Juara Harapan 3 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
15	Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan predikat "Kabupaten Terbaik I"	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPEDA
16	Prestasi Kabupaten Temanggung Terbaik 1 Tingkat Nasional Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2023	Kementerian PPN/Bappenas RI	Nasional	BAPPEDA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya penanganan penanggulangan kemiskinan dan Aksi Konvergensi Stunting. Kebijakan nasional yang diampu oleh Bappeda lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka penjabaran dari tujuan renja Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda dalam rangka akuntabilitas kinerja Bappeda.

Adapun penjabaran dari sasaran Renja Bappeda Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Bappeda Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100
			Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	95	95
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	%	90	90
			Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	%	90	90
			Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	%	90	90
			Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	%	90	90
			Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	%	90	90

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
			Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			
			Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur	%	90	90
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100
			Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100

Sumber : Renstra Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Bappeda Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasanya mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2024-2026.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKP Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 dengan RKP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2024

RAHCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KELITBAHAN)	9.745.073.555	A	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KELITBAHAN)	9.745.073.555	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.790.291.022	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.790.291.022	-
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.931.042.555	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.931.042.555	-
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.931.042.555	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.931.042.555	-
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.965.500	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.965.500	-
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	-
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	-
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	13.500.000	3)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	13.500.000	-
4)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	4)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	-
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.500	5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.500	-
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.283.000	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.283.000	-
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.960.000	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.960.000	-
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.923.000	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.923.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024		RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024		(+ / -)		
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.900.000	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.900.000	-
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.000.000	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.000.000	-
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000	-
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	-
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.069.782.500	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.069.782.500	-
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	869.782.500	a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	869.782.500	-
1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	-
2)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	819.782.500	2)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	819.782.500	-
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	-
1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	-
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	-
1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.715.000.000	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.715.000.000	-
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700.000.000	a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700.000.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000	-
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.000.000	-
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000	-
4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	-
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	615.000.000	b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	615.000.000	-
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.000.000	-
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	-
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000	-
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	400.000.000	c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	400.000.000	-
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.000.000	-
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75.000.000	-
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.170.000.000	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.170.000.000	-
a	Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	920.000.000	a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	920.000.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1)	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	500.000.000	1)	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	500.000.000	-
2)	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	220.000.000	2)	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	220.000.000	-
3)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	3)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	-
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	50.000.000	b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	50.000.000	-
1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50.000.000	1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50.000.000	-
c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.000.000	c	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.000.000	-
1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	150.000.000	1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	150.000.000	-
2)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	2)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	-
	TOTAL	9.745.073.555		TOTAL	9.745.073.555	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikator Bappeda Tahun 2024 telah sesuai antara Rancangan Renja Bappeda dengan RRPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Tembung Tahun 2024

Kode	Drajan / Bidang Drujan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kecapaian Tahun 2024				Prakiraan Mula Kemajuan Tahun 2024			
		Capaian Program	Keharusan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Targe Capaian Kinerja		Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
							Keharusan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Terealisasi	Tercapai
8	URUR PEMULJANG URUBAR PEMERTAJAH							9.745.073.555				4.746.696.181	
8 01	PEMERINTAJAH							8.575.073.555				3.731.846.181	
8 01 01	PROGRAM PEMULJANG URUBAR PEMERTAJAH DAERAH KARUPATER/SOTA							5.790.391.085				1.308.039.768	
8 01 01 2.02	Administrasi Kesatuan Persewaan Daerah							4.931.042.555				449.042.555	
8 01 01 2.02 0001	Persewaan Dag dan Yurispria ASK		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASK	52 Orang/ bulan	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			4.931.042.555				449.042.555	
8 01 01 2.06	Administrasi Usman Persewaan Daerah							108.965.500				111.000.000	
8 01 01 2.06 0001	Persewaan Usman Persewaan Daerah		Jumlah Paket Komputera Instalasi/Persewaan Usman Persewaan Daerah	1 Paket	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			5.330.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.330.000	
8 01 01 2.06 0004	Persewaan Usman Logistik Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Usman yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			17.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			17.000.000	
8 01 01 2.06 0006	Persewaan Usman Logistik dan Persewaan		Jumlah Paket Barang Usman dan Persewaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			13.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			13.500.000	
8 01 01 2.06 0008	Persewaan Usman Usman		Jumlah Laporan Persewaan Usman Usman	12 Laporan	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			24.000.000	
8 01 01 2.06 0009	Persewaan Usman Usman Usman		Jumlah Laporan Persewaan Usman Usman Usman	12 Laporan	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			49.965.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			51.000.000	
8 01 01 2.06 0001	Persewaan Usman Usman Usman		Jumlah Laporan Persewaan Usman Usman Usman	12 Laporan	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			948.385.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			999.997.313	
8 01 01 2.06 0001	Persewaan Usman Usman Usman		Jumlah Laporan Persewaan Usman Usman Usman	12 Laporan	Kab. Tembung, Seiman Kecamatan, Seiman Seiman Kel/Desa			1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.854.000	

Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Sumber Dana	Catatan Posing	Prebidan Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Mula Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Mula Kegiatan			Pagu Instansi (Rp.)	Target Tolak Ular	Target Capaian Kinerja	Kedudukan Dana/Pagu Instansi (Rp.)
							Kuantitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diselesaikan	36 Laporan	Kab. Tembung, Sema, Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diselesaikan	36 Laporan		98.960.000			100.000.000			
3 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran		Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran yang diselesaikan	12 Laporan	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran yang diselesaikan	12 Laporan		16.921.000			17.000.000			
3 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kendaran		Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kendaran yang diselesaikan	12 Laporan	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kendaran yang diselesaikan	12 Laporan		436.900.000			451.447.313			
3 01 01 2.09	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat								202.000.000			176.000.000			
3 01 01 3.09 0003	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Jumlah Kelembagaan Desa Operasional atau Laporan yang dipublikasikan dan ditayangkan	32 Unit	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Desa Operasional atau Laporan yang dipublikasikan dan ditayangkan	32 Unit		154.000.000			125.000.000			
3 01 01 3.09 0009	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Jumlah Kegiatan Kerja dan Kegiatan Lainnya yang dipublikasikan dan ditayangkan	2 Unit	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Kerja dan Kegiatan Lainnya yang dipublikasikan dan ditayangkan	2 Unit		48.000.000			30.000.000			
3 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAERAH								1.669.763.000			823.881.413			
3 01 02 3.01 0003	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen		669.763.000			623.881.413			
3 01 02 3.01 0007	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang dipublikasikan dan ditayangkan	5 Dokumen	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang dipublikasikan dan ditayangkan	5 Dokumen		50.000.000			50.000.000			
3 01 02 3.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								100.000.000			100.000.000			
3 01 02 3.02 0003	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3 Buku	Kab. Tembung, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3 Buku		100.000.000			100.000.000			

Kode		Grosses / Bidang Grosses / Sub Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		
			Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Cetakan Penciling	Target Capaian Kinerja		
							Program	Kualitas Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolak Dilar	Target
5	01	02	2.03	Program dan Pelaksanaan Evaluasi dan Pembinaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Laporan	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5	01	02	2.01	0001	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Dokumen	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5	01	02	2.01	0002	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Laporan	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5	01	03	2.01	0003	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Dokumen	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	5 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5	01	03	2.01	0004	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Dokumen	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5	01	03	2.01	0005	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	4 Dokumen	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	4 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5	01	03	2.01	0007	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	6 Laporan	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	6 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
5	01	03	2.02	0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	6 Dokumen	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	6 Dokumen	615.000.000	615.000.000	615.000.000	615.000.000
5	01	03	2.02	0002	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Laporan	Kab. Transunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000

Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024			Prakiraan Mula Retensi Tahun 2024			
		Capaian Program	Skorasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Materi Basis Data/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Skorasi Sub Kegiatan				
5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPJL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disubmisi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disubmisi (RPJPD, RPJMD dan RPJL)	1 Dokumen	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disubmisi (RPJPD, RPJMD dan RPJL)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	
5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan RPJL	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disubmisi (RPJPD, RPJMD dan RPJL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		387.920.000	
5 01 03 2.03 0003	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.000.000	
5 05	PEMBELITAN DAN PENGEMBANGAN									1.024.850.000	
5 05 03	PROGAM PEMBELITAN DAN PENGEMBANGAN DASAR									1.024.850.000	
5 05 03 3.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		454.820.000	
5 05 02 3.01 0001	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		235.000.000	
5 05 01 3.01 0012	Penelitian dan Pengembangan dan Penelitian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	4 Laporan	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	4 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	
5 05 02 3.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									100.000.000	
5 05 02 3.03 0010	Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Transregency, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Masyarakat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	

Kode	Gedung / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Defisit Peuting	Prediksi Nilai Keseluruhan Tahun 2025		
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Page Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/Program Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ular	
5 06 02 2 04	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi							200.000.000				100.000.000	
5 05 02 2 04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Pelebaran di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pelebaran di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen	Kab. Tembunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pelebaran di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			50.000.000	
5 05 02 2 04 0004	Penelitian dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Laporan	Kab. Tembunggung, Serang, Kecamatan, Serang, Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			50.000.000	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Bappeda Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Bappeda itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Bappeda dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Bappeda Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Bappeda Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,39%, realisasi Belanja Modal sebesar 97,51%, , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 52,11%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Bappeda mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.745.073.555,- yang terdiri dari 4 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Bappeda dapat tercapai sesuai dengan penetahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP.19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 050/ 006 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) TAHUN 2024
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan penyesuaian dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang berkembang, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan materi Renja Bappeda Tahun 2024 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menghadiri dan mengikuti setiap rapat penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024;
3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
4. Bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 dan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Februari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Masing-masing anggota Tim;
2. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ 006 TAHUN 2023
TANGGAL : Februari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) TAHUN 2024
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Bappeda Kabupaten Temanggung	Ketua
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
8	Kasubbag Keuangan	Anggota
9	Fungsional Perencana Pertama Sekretariat	Anggota
10	Pengelola Program dan Kegiatan Sekretariat	Anggota

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

